

ABSTRAK

Kendaraan motor listrik menjadi inovasi terbaru transportasi darat yang menjadi perbincangan belakangan ini. Beberapa tahun terakhir, penggunaan kendaraan motor listrik di Indonesia mengalami peningkatan signifikan. Namun, kendaraan motor listrik yang sebelumnya bertujuan untuk menghemat penggunaan bensin, justru menyebabkan beberapa kekhawatiran, karena banyaknya permasalahan yang disebabkan oleh pengguna kendaraan motor listrik. Regulasi terkait penggunaan kendaraan bermotor listrik masih belum sepenuhnya diakomodasi dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Menimbulkan kontradiksi dan celah hukum yang berpotensi menyebabkan pelanggaran, seperti perbedaan klasifikasi, kewajiban registrasi kendaraan, dan batas usia pengguna yang tidak konsisten dengan aturan kepemilikan Surat Izin Mengemudi (SIM). Dalam penelitian ini terdapat permasalahan sebagai berikut: *pertama*, klasifikasi kendaraan motor listrik sebagai objek Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. *Kedua*, Ketercukupan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam mengakomodasi ketentuan pidana terhadap penggunaan kendaraan motor listrik di Indonesia.

Metode penelitian yang digunakan adalah normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum primer yang berupa Undang-Undang yang relevan, data sekunder menggunakan buku yang relevan, dan tersier seperti kamus. Secara keseluruhan data dikumpulkan melalui studi kepustakaan, yang kemudian dipaparkan secara deskriptif lalu ditarik kesimpulan menggunakan metode deduktif.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa, *pertama*, berdasarkan klasifikasi kendaraan bermotor menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kendaraan motor listrik dapat diklasifikasikan sebagai kendaraan bermotor sehingga harus tunduk terhadap peraturan tersebut. *Kedua*, terdapat kontradiksi dan ketiadaan norma dalam regulasi yang relevan dengan penggunaan kendaraan motor listrik, kontradiksi dan ketiadaan norma yang terjadi berkaitan dengan kewajiban registrasi, batas usia pengguna, serta sanksi hukum, sehingga Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tersebut tidak cukup mengakomodasi ketentuan penggunaan kendaraan motor listrik di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan reevaluasi terhadap tersebut agar terdapat pembaharuan hukum yang mengakomodasi kendaraan motor listrik.

Kata kunci: Reevaluasi Peraturan, Pelanggaran Lalu Lintas, Kendaraan Motor Listrik.

ABSTRACT

Electric motor vehicles are the latest innovation in the field of land transportation that has become a hot topic of conversation lately. In recent years, the use of electric motor vehicles in Indonesia has increased significantly. However, electric motor vehicles, which were previously intended to save fuel, have actually raised several concerns, due to the many problems caused by electric motor vehicle users. Regulations regarding the use of electric motor vehicles have not been fully accommodated in Law Number 22 of 2009 concerning Traffic and Road Transportation. This creates contradictions and legal loopholes that have the potential to cause violations, such as differences in classification, vehicle registration requirements, and user age limits that are inconsistent with the rules for owning a Driving License (SIM). In this study, there are the following problems: first, the classification of electric motor vehicles as objects of Law Number 22 of 2009 concerning Traffic and Road Transportation. Second, the adequacy of Law Number 22 of 2009 concerning Traffic and Road Transportation in accommodating criminal provisions regarding the use of electric motor vehicles in Indonesia.

The research method used is normative with a legislative and conceptual approach. Primary legal materials in the form of relevant laws and regulations, secondary data using relevant books, and tertiary data such as dictionaries. Overall, data was collected through literature study, which was then presented descriptively and conclusions were drawn using deductive methods.

The results of the study show that, first, based on the classification of motorized vehicles according to Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation, electric motor vehicles can be classified as motorized vehicles so that they must be subject to these regulations. Second, there are contradictions and absence of norms in regulations relevant to the use of electric motor vehicles, contradictions and absence of norms that occur are related to registration obligations, user age limits, and legal sanctions, so that Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation is not sufficient to accommodate the provisions for the use of electric motor vehicles in Indonesia. Therefore, a reevaluation of the law is needed so that there is a legal reform that accommodates electric motorized vehicles.

Keywords: *Reevaluation of Regulations, Traffic Violations, Electric Motor Vehicles.*